

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Zainudidn. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Astara, I Wayan Wesna. *Hukum Kepailitan Teori dan Praktik*. Denpasar: Warmadewa University Press, 2018.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2020.
- Pokja Laporan Tahunan MARI. "Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung 2016." Jakarta, 2016.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2014.
- Simanjuntak, Ricardo. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kontan Publishing, 2003.
- Sinaga, Yamsudin M. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sriwidodo, Joko, dan Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2024.
- Subhan, Hadi M. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sunarmi, dan Bismar Nasution. "Diktat Hukum." Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Jurnal Ilmiah

- Siti Malikhatun Badriyah. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 384–92.
<https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>.
- Harsono, Ivan, dan Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1067–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>.
- Kalundas, Syamsu, Mahendra Putra Kurnia, dan M Fauzi. "Analisis Yuridis

Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Pengadilan Niaga.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 238–48. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1251>.

Paunio, Elina. “Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order.” *German Law Journal* 10, no. 11 (2009): 1469–93. <https://doi.org/10.1017/S2071832200018332>.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

Tesis/Pidato Pengukuhan Guru Besar

Buana, Mirza Satria. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Indrati, Erlyn. “Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum.” dalam *Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang, 2010.

Ismail, Fauzie Kamal. “Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan.” Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4443.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Naskah Akademik

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018.